

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum masa reformasi Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum secara langsung dan terbuka pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 dalam memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun pemilihan presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dan yang terakhir pada 2019 kemarin. Setiap penyelenggaraan pemilihan tersebut, Indonesia menargetkan angka partisipasi politik masyarakat terbilang tinggi. Contohnya pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu, pemerintah menargetkan partisipasi politik masyarakat sebesar 77,5% dan jumlah partisipasi politik masyarakat yang diperoleh melebihi target yakni sebanyak 81% (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan bagian penting dalam kesuksesan pada setiap pelaksanaan pemilu.

**Tabel 1.1**

#### **Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Pemilihan Presiden di Kabupaten Karawang Tiga Periode Terakhir**

NO	PILPRES TAHUN	DPT+DPTb+DPH	PEROLEHAN SUARA PASLON			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
			PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3			
1	2009	1,541,267	367,015	702,278	71,620	1,140,913	54,727	1,195,640
2	2014	1,757,369	708,495	473,557		1,182,052	9,030	1,191,082
3	2019	1,743,044	584,682	779,266		1,363,948	31,724	1,395,672

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel 1.1 ada peningkatan yang signifikan pada pilpres 2014 dan pilpres 2019. Dimana pada pilpres 2014 angka partisipasi politik masyarakat hanya sebesar 68%, namun pada pilpres 2019 angka partisipasi politik masyarakat memperoleh 80%. Dalam tiga periode terakhir terlihat jelas bahwa angka partisipasi

politik masyarakat di daerah Kabupaten Karawang cukup tinggi. Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden tiga periode terakhir yang menggunakan hak pilihnya sebesar 74,6%, hal ini menandakan bahwa partisipasi politik masyarakat Kabupaten Karawang masih cukup baik.

Salah satu wujud nyata dari pemilihan umum yakni dengan adanya pemilihan kepala daerah atau biasa disebut dengan Pilkada. Pilkada baru-baru ini menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Karawang. Pasalnya Pemilihan Kepala Daerah serentak saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena di tengah wabah pandemi *Covid-19*, hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas karena melihat dari banyaknya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Karawang sendiri yakni sebanyak 1.656.200 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, 2020). Dari jumlah tersebut tidak sedikit orang yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dapat menimbulkan kerumunan, walaupun ada penambahan TPS dari sebelumnya 3.530 TPS bertambah 1.374 menjadi 4.904 TPS (Miftah Farid, 2020 dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id)).

**Tabel 1.2**

**Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Karawang Tiga Periode Terakhir**

NO	PILKADA TAHUN	DPT+DPTb+DPH	PEROLEHAN SUARA PASLON						SUARASAHA	SUARATIDAKSAHA	SUARASAHA + TIDAKSAHA
			PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5	PASLON 6			
1	2010	1,551,925	Eli & Endang 153,962	Karda & Deden 122,062	Soni & Dadang 288,732	Ade & Cellica 372,822	Endang & Agustia 23,372		960,950	27,857	988,807
2	2015	1,575,128	Nace & Yeni 22,570	Marzuki & Dedi 198,094	Cellica & Ahmad 533,240	Daday & Edi 81,022	Nanan & Asep 8,981	Saan & Iman 200,509	1,044,416	22,611	1,067,027
3	2020	1,656,200	Yesi & Adly 129,547	Cellica & Aep 678,871	Ahmad & Yusni 322,046				1,130,464	29,198	1,159,662

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah tiga periode terakhir menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat selalu meningkat di setiap pelaksanaannya. Dalam tiga periode terakhir pilkada yang telah di selenggarakan sedikitnya kurang lebih ada 500.000 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih menjadi golongan putih (golput). Pada pilkada 2020 kemarin partisipasi politik masyarakat mencapai 70,1%, jumlah tersebut lebih banyak di bandingkan pada pilkada 2015 yang hanya memperoleh 67% partisipasi politik masyarakat.

Menurut Surbakti, (2007:142) partisipasi dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Hal iyang di maksud partisipasi aktif yaitu memberikan ide atau gagasan tentang kebijakan, memberikan opsi pilihan kebijakan umum yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan solusi untuk menyempurnakan kebijakan, membayar pajak

dan berpartisipasi dalam setiap pemilu. Sedangkan kegiatan yang termasuk dalam partisipasi pasif berupa kegiatan yang mematuhi pemerintah serta mengiyakan dan menyelenggarakan setiap keputusan pemangku kepentingan. Dapat di simpulkan bahwa partisipasi aktif yaitu warga negara yang kritis dalam setiap *step by step* penyelenggaraan Pilkada tersebut dan partisipasi pasif ialah orang yang acuh pada kebijakan atau keputusan yang telah dibuat dan hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh para elit politik.

Dengan demikian warga negara yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangkurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang sifatnya mengikat, atau dengan kata lain mereka percaya bahwa kegiatan partisipasi yang mereka terlibat di dalamnya mempunyai efek politik. Karena segala aktivitas masyarakat tidak terlepas dari segala kegiatan politik, maka indikator dari sebuah Negara yang demokratis ialah tingkat partisipasi masyarakatnya yang kian meningkat.

Demokrasi merupakan pokok pikiran dalam mengubah struktur politik di dunia. Selain itu, adanya demokrasi membuat harapan baru terhadap kedaulatan dan keadilan masyarakat (Kusmanto, 2014). Pilkada serentak bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk memangkas anggaran yg di keluarkan oleh pemerintah seperti pemberian honor kepada setiap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan untuk menciptakan iklim demokratis, dimana di dalamnya

partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu siapa calon pemimpin bangsa kedepan. Pandangan ini berangkat dari asumsi pentingnya partisipasi masyarakat atas suksesnya pemilu yg diselenggarakan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pilkada selalu melahirkan berbagai konflik diantaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih tetap, netralitas penyelenggara pilkada, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada terhadap peraturan yang berlaku. Belum lagi konflik sosial di masyarakat yang timbul karena perbedaan pendapat terhadap suatu keberpihakan pilihan pasangan calon, yang berujung konflik yang berkepanjangan bahkan bisa memutus tali persaudaraan. Ini hal yang memang bisa dibilang sepele namun dampaknya begitu luas bagi kehidupan masyarakat yang setiap harinya selalu saling berinteraksi, karena masyarakat menjadi terkotak-kotak dan terpecah belah. Kebijakan pemberlakuan *Social distancing* hanya untuk menjaga jarak agar tidak tertular virus *Covid-19* bukan untuk memecah belah kerukunan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah 2020 di masa pandemi *covid-19*, Pemilihan Kepala Daerah rencananya akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dengan sejumlah aturan baru yg lebih ketat. Misal pada saat kampanye, pada tahun sebelumnya kampanye dilaksanakan di tempat yang terbuka namun sekarang kampanye dilakukan di ruangan tertutup atau di dalam gedung, peserta yang hadir dibatasi maksimal lima puluh orang dengan memperhitungkan jaga jarak minimal satu meter antar peserta kampanye, dan wajib menerapkan protokol kesehatan serta

dilaksanakan secara daring. Kemudian debat publik dilakukan di dalam gedung Lembaga Penyiaran Publik atau Swasta dan dihadiri oleh undangan atau pendukung sebanyak lima puluh orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat (KPU RI, 2020).

**Tabel 1.3 Hasil Survei Nasional Pilkada 2020**

	BASE	Seberapa Jurdil Pilkada?			Kepuasan atas Pelaksanaan Pilkada			Yakin Pilkada akan melahirkan pemimpin yang baik?		
		Sangat/Cukup Jurdil	Kurang/Tidak Jurdil	TT/TJ	Sangat/Cukup Puas	Kurang/Tidak Puas	TT/TJ	Sangat/Cukup Yakin	Kurang/Tidak Yakin	TT/TJ
<b>Desa-Kota</b>										
Pedesaan	<b>53.6</b>	84	4	12	80	8	12	83	10	6
Perkotaan	<b>46.4</b>	87	5	8	86	6	9	86	8	6
<b>Usia</b>										
<25 tahun	<b>22.0</b>	92	2	6	88	2	10	87	5	8
26-40 tahun	<b>38.1</b>	87	4	9	84	6	10	85	9	6
41-55 tahun	<b>24.0</b>	81	5	13	79	10	11	81	11	7
> 55 tahun	<b>16.0</b>	78	6	16	76	12	12	86	12	2
<b>Pendidikan</b>										
<= SD	<b>31.8</b>	75	3	22	71	5	23	79	10	11
SLTP	<b>17.7</b>	84	5	10	85	9	6	82	14	4
SLTA	<b>36.2</b>	92	5	3	87	8	5	90	6	5
PT	<b>14.3</b>	94	4	2	92	7	2	89	9	2

Sumber: Saiful Mujani *Research and Consulting*, 2020

Berdasarkan tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pilkada cukup jurdil, merasa puas dengan penyelenggaraan pilkada dan sangat yakin bahwa pilkada akan menghasilkan pemimpin yang dapat membuat daerahnya lebih maju lagi kedepannya. Meskipun pandangan masyarakat kota dan

berpendidikan tinggi namun masih kurang berperan serta dalam pilkada. Banyak yang tidak memilih calon pemimpin dikarenakan takut tertular *Covid-19*. Walaupun setiap TPS dilengkapi dengan fasilitas pencegahan penularan virus *Covid-19* tapi masih ada sebagian masyarakat yang masih takut tertular jika datang ke TPS.

**Tabel 1.4 Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jawa Barat**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Suara Masuk	Persentase Data Partisipasi 2020	Keterangan (Gap dibanding 2015)
1	Kabupaten Bandung	2.370.370	1.711.642	72,18%	↑ 9,28%
2	Kabupaten Cianjur	1.631.546	1.102.548	67,24%	↑ 10,62%
3	Kota Depok	1.240.457	777.737	62,80%	↑ 6,65%
4	Kabupaten Indramayu	1.302.788	870.516	66,19%	↑ 7,24%
5	Kabupaten Karawang	1.656.200	1.159.662	70,03%	↑ 3,63%
6	Kabupaten Pangandaran	320.008	266.482	83,88%	↑ 5,94%
7	Kabupaten Sukabumi	1.816.214	1.102.992	60,51%	↑ 1,59%
8	Kabupaten Tasikmalaya	1.332.978	959.186	73,17%	↑ 13,04%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Peningkatan partisipasi pemilih tertinggi dicatat oleh Kabupaten Tasikmalaya dengan partisipasi sekitar 73,17% pada tahun 2020 atau naik sebanyak 13,04% jika dibandingkan pada Pilkada 2015 yang mencatat partisipasi pemilih sebanyak 60,33%. Sedangkan kenaikan terendah dicatat oleh Kabupaten Sukabumi sekitar 1,59%. Dengan rincian, pada Pilkada 2015 sebanyak 58,92% naik menjadi

61,51% pada Pilkada tahun ini. Sementara itu, untuk untuk rata-rata partisipasi pemilih di delapan daerah tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat mencatat adanya kenaikan sebesar 7,25%.

Penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun ini memerlukan anggaran yang lebih besar lagi, jika pada tahun sebelumnya anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp12,01 Triliun maka pada tahun ini anggaran yang harus di keluarkan sebesar Rp15,22 Triliun (KPU RI,2020). Sedangkan anggaran yang disiapkan untuk Pilkada Karawang 2020 sebesar Rp.97,9 Miliar, lebih besar dari Pilkada tahun 2015 yang memerlukan anggaran Rp.80 Miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk anggaran tambahan sebagai biaya untuk mengantisipasi penyebaran *covid-19*. Hal ini akan tercatat sebagai sejarah dalam pesta demokrasi di Indonesia karena diselenggarakan di tengah pandemi *covid-19*. Bila melihat ke belakang pada pemilu serentak 2019, banyak petugas TPS yg meninggal dunia akibat kelelahan apalagi jika pilkada serentak kali ini akan digelar pada saat pandemi yang tentunya akan memiliki resiko lebih besar (Kompas.com, 2020).



Gambar 1.1 Grafik Kasus Covid-19 Kabupaten Karawang 26 Juni 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Melihat semakin bertambahnya kasus *covid-19* khususnya di Kabupaten Karawang setiap harinya menjadi kekhawatiran tersendiri dikalangan masyarakat. Masyarakat dibuat kebingungan oleh kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga menimbulkan reaksi negatif tentang pilkada serentak tahun ini dan mempunyai tanda tanya besar. Hal ini dikarenakan pemerintah nampak mengabaikan keselamatan masyarakat dengan tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada saat pandemi belum mereda. Ini menjadi fenomena baru yang terjadi di masyarakat terlebih di Kabupaten Karawang, karena mayoritas pekerjaan dan penduduk di sana ialah seorang petani dan bisa dibilang masih terlalu awam jika berbicara mengenai politik.

Memang tidak bisa dipungkiri aturan yang baru pada pilkada dimasa pandemi ini sangat minim pengetahuan atas prosedur yang baru dalam menyelenggarakan pilkada ini. Karena sosialisasi yang di lakukan tidak seperti

biasa, dilakukan terbuka dan dapat dihadiri orang banyak, banyak batasan-batasan saat melakukan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu. Ini menjadi tantangan baru bagi pihak penyelenggara dan pasangan calon yang akan bersaing mendapatkan empati masyarakat luas, serta dukungannya agar dapat berpartisipasi pada pilkada tahun ini, minimal menggunakan hak pilihnya sehingga menurunkan angka Golongan Putih (golput).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Pada tahun ini KPU Kabupaten Karawang menargetkan angka partisipasi masyarakat sebesar 77,5%, melihat di Kabupaten Karawang sendiri angka golput masih sangat tinggi, pada tahun 2018 angka partisipasi masyarakat hanya 68%, terlebih di desa bagian pesisir pantai utara yaitu Batujaya angka partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih masih di bawah 50% (KPU Kabupaten Karawang, 2020). Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan oleh para penyelenggara Pilkada kepada masyarakat setempat, dan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Karawang. Maka dari itu penulis bertujuan mengambil penelitian dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19.”**

## **1.1 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin diajukan penulis adalah:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di masa pandemi *Covid-19*?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Karawang?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di masa pandemi *Covid-19*.
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Karawang.

### **1.3 Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

#### **1.3.1 Signifikansi Akademik**

Berbagai penelitian tentang partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya. Jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh) jurnal. Namun, peneliti belum menemukan penelitian terkait bagaimana “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Masa pandemi *Covid-19*.”

Rujukan pertama pada penelitian ini dengan judul, Partisipasi politik masyarakat pada pilkada kota Pekanbaru oleh (Fadil anugrah prasetyo, 2017). Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil olah dan analisis data yang dipaparkan dalam penghitungan koefisien korelasi faktor sosiologis tidak berpengaruh dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru. Sedangkan faktor Psikologis ada kaitan yang signifikan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru. Faktor Rasional ada hubungan signifikan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru. Faktor Administrasi dapat memepengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru. Faktor Kerja KPU ada hubungan erat dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru. Faktor

Kerja Calon ada kaitannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru.

Rujukan kedua pada penelitian berjudul, Peran Badan Pengawas Pemilu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lanjut usia pada Pemilu 2019 di kota Pangkalpinang (Adelia, Hendra Saputra, Sakdon, Tri Kurniawan, 2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lanjut usia di Panti Bhakti Siti Anna masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana keinginan mereka untuk terlibat di pemilu 2019 nanti. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan partisipasi lanjut usia, yakni dengan sosialisasi politik dan pendekatan langsung ke para masyarakat lanjut usia. Dari dua upaya tersebut, masyarakat lanjut usia menunjukkan sisi semangat yang tinggi untuk memberikan suaranya dalam pemilu 2019.

Rujukan ketiga pada penelitian ini dengan judul, Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang (M. Ilham Wahyudi Prasetyo, M. Fachri Adnan, 2018) kesimpulan penelitian ini bahwa sosialisasi politik ada kaitannya dengan partisipasi masyarakat termasuk pemilih pemula yang belum mengetahui sepenuhnya peran mereka dalam proses politik. Sosialisasi Politik yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Partai politik yang mengusung kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota di Kota Padang memberi efek pengaruh yang besar terhadap partisipasi politik pemilih pemula yang ada di Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Kuranji.

Rujukan keempat penelitian ini berjudul, Problematika partisipasi politik pilkada provinsi Jawa tengah (Solikhah Mufrikah, 2013) Pembahasan ini mengenai pemetaan masalah yang menimbulkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2013 rendah dan angka golput tinggi. Jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya pada tahun 2008 ditemukan adanya serangkaian faktor yang menyebabkan hal pada politik itu terjadi. Faktor itu berkaitan dengan kepribadian pemilih (internal) dan institusional (eksternal pemilihan). Faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari diri pemilih sendiri. Ini berkaitan dengan masalah pola pikir, keyakinan agama dan pandangan pemilih. Faktor kedua, faktor eksternal dipengaruhi dari luar kemampuan diri pemilih. Kondisi ini berkaitan dengan buruknya manajerial pelaksanaan Pilkada, seperti masalah administrasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), pengiriman surat suara yang tersendat, tidak cocoknya data pemilih, dan lain sebagainya. Selain kedua faktor tersebut tingginya angka golput juga berkaitan dengan faktor tidak adanya pendidikan politik dan sosialisasi politik yang didapatkan warga negara.

Rujukan kelima penelitian ini berjudul, Implikasi partisipasi masyarakat pada pilkada serentak dalam meningkatkan demokrasi konstitusional di Indonesia (Studi terhadap pelaksanaan pilkada serentak di provinsi Sulawesi Selatan) oleh (Lisma, Lita Tyesta A.L.W, 2015) kesimpulannya (1) partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Sulawesi Selatan Tahun 2015 cukup bervariasi dan tidak mengalami peningkatan yang tinggi bahkan mengalami penurunan (2) faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum maksimal karena faktor sosial, politik, administrasi, pendidikan, budaya dan pekerjaan serta sosialisasi yang masih sangat

kurang (3) upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperbaiki regulasi yang sudah tidak sesuai dengan konteks dan melibatkan tokoh yang ada serta meningkatkan sosialisasi.

Rujukan keenam penelitian ini berjudul, Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2017 Di Kabupaten Aceh Timur (Mahmudiah, Mahdi Syahbandir, 2017) Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab golongan putih (golput) yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2017 disebabkan oleh tiga faktor, diantaranya faktor status sosial dan ekonomi, faktor kekecewaan pada realitas pemerintah dan politik, dan faktor kesadaran politik. Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Timur agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, serta membuka diri untuk tidak peduli terhadap hak pilihnya yang telah diberikan kepada setiap warga negara.

Rujukan ketujuh penelitian ini berjudul, strategi KPU kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 (Muhammad Choirullah Pulungan, Mudyati Rahmatunisa, Ari Ganjar Herdiansah, 2020) hasil penelitian dilapangan, peneliti mendapatkan temuan bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyebar diberbagai lapisan masyarakat. Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam sosialisasi terbagi dua yaitu dengan memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan KPU Kota Bekasi melalui program relawan demokrasi dengan sasaran target 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Pada tingkat penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga terdapat divisi sosialisasi dan partisipasi

masyarakat. Selain itu peran teknologi seperti sosial media juga memiliki peran tpada optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi. Strategi yang dilakukan KPU Kota Bekasi untuk optimalisasi pemilih dilakukan dengan pemerataan sosialisasi terutama di wilayah dimana partisipasi telah menunjukkan adanya peningkatan.

Rujukan kedelapan penelitian ini berjudul, Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangandaran (Emy yulia, 2015) hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 partisipasi masyarakat tergolong baik. Faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi yaitu masyarakat tertarik dengan program yang disampaikan paangan calon, pasangan calon yang memiliki pengalaman dan program kerja yang bagus akan menarik hati masyarakat. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya informasi tentang sosialisasi pelaksanaan Pilkada, upaya yang dilakukan berupa sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada, pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar tidak tergiur dengan politik uang sehingga masyarakat dapat memilih pilihannya dengan sepenuh hati.

Rujukan kesembilan penelitian ini berjudul, Kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi (L.M. Azhar Sa'ban, Andy Arya Maulana Wijaya , 2018) hasil penelitian pertama masyarakat Kabupaten Wakatobi telah berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati dan berdasarkan data yang ada



tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Wakatobi masih rendah. Dapat dilihat dari angka masyarakat yang golput pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu 57.463 orang dan sisanya tidak menggunakan hak pilih 21.141 orang. Temuan penelitian kedua, yaitu dibalik kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat tentu saja ada faktor yang mempengaruhi kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Wakatobi yaitu 1) Faktor Teknis, 2) Faktor Administratif, 3) Sosialisasi, 4) Faktor Politik.

Rujukan kesepuluh penelitian ini berjudul, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2017 di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh (T. Rizky Aulia Rahmat, Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si., 2017) hasil dari penelitian yang dapatkan dari penelitian ini meliputi: Pertama faktor tingkat pendidikan, semakin berkembangnya modernitas yang terjadi maka semakin tinggi pula pendidikan seorang pemimpin. Kedua faktor tingkat jenis kelamin, yang tidak menjadi rujukan dalam memilih dikarenakan perkembangan zaman dari kemajuan. Ketiga faktor tingkat status sosial dan ekonomi, yang disebabkan oleh pentingnya status sosial dan ekonomi dalam kehidupan.

Penelitian terdahulu banyak membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat (Fadil anugrah prasetyo, 2017; M. Ilham Wahyudi Prasetyo, M. Fachri Adnan, 2018; Solkhah Mufrikhah, 2013; Lisma, Lita Tyesta A.L.W, 2015; Mahmudiah, Mahdi Syahbandir, 2017; Emy Yulia, 2015; L.M. Azhar Sa'ban, Andy Arya Maulana Wijaya , 2018; T. Rizky Aulia Rahmat, Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si., 2017). Namun ada juga penelitian yang

membahas tentang peran Bawaslu terhadap partisipasi masyarakat (Adelia, Hendra Saputra, Sakdon, Tri Kurniawan, 2019). Sedangkan penelitian lainnya membahas langkah-langkah meningkatkan partisipasi pemilih (Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunisa, Ari Ganjar Herdiansah, 2020).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan tentang faktor-faktor yg mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat serta peran Bawaslu terhadap partisipasi masyarakat serta langkah-langkah KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Sedangkan penelitian ini akan melihat dan membahas strategi apa yang digunakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak 2020 pada masa Pandemi *Covid-19* serta berfokus pada faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 pada masa pandemi *covid-19*.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pentingnya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di masa *Covid-19* dan dapat menekan angka golongan putih (Golput) sehingga masyarakat mampu menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

### **1.3.2 Signifikansi Praktis**

#### 1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pilkada serentak untuk membantu mengawasi tahapan-tahapan disetiap jalannya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

#### 2. Manfaat bagi Pemerintah

Sebagai masukan untuk terus meningkatkan sosialisasi tentang pilkada serentak di masa Pandemi *Covid-19* sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat agar tetap berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini adalah bab pendahuluan yang berisikan gambaran umum mengenai dasar penelitian dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan praktis serta sistematika penulisan. Dalam signifikansi penelitian akademik peneliti menguraikan tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini.

#### **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi tentang uraian teori yang berkaitan dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan

Kepala Daerah Serentak 2020 di Masa Pandemi *Covid-19* serta menguraikan kerangka berpikir dan asumsi penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan pembahasan paardigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian serta keterbatasan penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang temuan-temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Masa Pandemi *Covid-19*”.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari temuan penelitian dan rekomendasi yang peneliti berikan bagi instansi terkait dan peneliti selanjutnya.